

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan basis pelaksanaan penyuluhan pertanian di unit terkecil, yakni kecamatan. Menurut Hariadi (2015) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan *center of extension* memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian karena menjadi pusat kegiatan baik bagi penyuluh pertanian, swadaya maupun swasta. Fungsi dan peran BPP dikembangkan untuk mencapai harapan yang diinginkan, yaitu swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Peran dan fungsi BPP adalah penyusunan program penyuluhan, menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan teknologi, memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan usaha untuk mendukung program swasembada pangan serta sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan usaha.

Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan menyatakan bahwa Balai Penyuluhan merupakan tempat Satuan Administrasi Pangkal bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja Balai. Balai Penyuluhan di kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai saat ini belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana dan pembiayaan. Selain keterbatasan biaya, juga adanya kesenjangan persepsi tentang peran dan keberadaan Balai Penyuluh.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah maka dukungan, pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan oleh pemerintah swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan penyuluhan di daerah terutama kelembagaan penyuluhan di kecamatan adalah 4 (empat) sukses program pembangunan

pertanian yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan nilai tambah dan Eksport dan (4) Peningkatan Kesejahteraan petani.

Adapun tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan adalah:

- 1) Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- 3) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- 4) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- 6) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Fungsi Balai Penyuluhan di kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Balai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ketersediaan informasi di Balai Penyuluhan di kecamatan sangat diperlukan dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani/usaha perikanan/usaha kehutanan.

Informasi yang perlu disediakan oleh Balai Penyuluhan di Kecamatan antara lain:

- 1) Informasi teknologi yang berkaitan dengan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta manajemen usaha tani/usaha perikanan/usaha kehutanan;
- 2) Informasi sarana produksi terutama menyangkut ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, alat dan mesin pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- 3) Informasi pembiayaan terutama menyangkut satuan biaya untuk melaksanakan suatu usaha agribisnis baik budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
- 4) Informasi pasar diantaranya harga komoditi, permintaan komoditi (jumlah, mutu, kapan diperlukan pembeli/konsumen), sumber produksi; dan
- 5) Informasi kebijakan seperti pengaturan pola produksi, penggunaan produk sarana produksi/teknologi/sumberdaya air, pasar, lingkungan hidup, kelestarian sumberdaya alam, dan lain-lain.

Untuk menyiapkan informasi yang diperlukan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Balai Penyuluhan di kecamatan melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan cara antara lain:

- 1) Mengakses *Cyber Extension*;
- 2) Pengumpulan data lapangan/survei;
- 3) Melaksanakan kaji terap;
- 4) Melaksanakan kaji tindak;
- 5) Apresiasi (penelusuran teknologi yang dikembangkan oleh pelaku utama); dan
- 6) Konsultasi dengan instansi teknis terkait baik luar maupun lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Data dan informasi yang terkumpul dari kegiatan tersebut di atas selanjutnya diolah dan dikemas sesuai dengan fungsi kemasan dan sasaran informasi. Kemasan informasi dapat digunakan menjadi bahan untuk menyusun dan membuat lembar informasi (liptan), folder, poster, brosur, buletin, alat peraga, papan panel/papan pengumuman, radio, kaset, CD, sosialisasi dan sekolah lapangan (SL).

BPP sebagai penyedia sarana informasi pertanian baik bagi petani maupun pihak-pihak diluar kelembagaan BPP. Informasi ini disusun penyuluh dalam rangka penyusunan materi penyuluhan, penyusunan program penyuluhan dan penyusunan Rencana Kerja Penyuluh, serta untuk mengetahui potensi wilayah penyuluh pertanian. Kegiatannya antara lain melalui *Cyber Extension*, kaji terap, pengumpulan data base, konsultasi dengan instansi terkait, serta memfasilitasi penyuluh untuk mengikuti seminar maupun pelatihan-pelatihan.

Menurut Andriyati dkk (2012), BPP yang telah tersedia di setiap kecamatan memudahkan petani untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan BPP dan penyuluh yang ada untuk memperoleh informasi. Hal ini didukung dengan persepsi petani terhadap pertemuan dengan penyuluh. Melalui pertemuan tersebut, petani dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan teknologi produksi, pengolahan hasil, maupun pemasaran. Ketersediaan media personal seperti pertemuan sangat penting karena media tersebut paling disukai petani sebagai sarana untuk memperoleh informasi pertanian. Selain itu, penyuluh merupakan sumber utama petani dalam memperoleh informasi pertanian. Adanya keikutsertaan petani mengikuti penyuluhan, petani dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan usaha tani.

2. Definisi Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Menurut Merton (dalam Roho 2007) menyatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap

aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Anwar dkk (2013), secara sosiologis istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan (*established*). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan di atas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adalah tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh suatu lembaga sesuai dengan status dan kedudukan yang dimiliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan masyarakat.

2. Program Kostratani

Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Kostratani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, antara lain: a. pendekatan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas; b. Penguatan pos penyuluhan desa; c. Penguatan Kelembagaan Petani dan KEP; d. Pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; e. Fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; dan f. Pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pasca panen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK); 2. Membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi; 3. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian; 4. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya; dan 5. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan, hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi.

Tujuan jangka panjang kostratani adalah mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan program jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Susunan keanggotaan Kostratani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: Ketua: Camat. Ketua Harian: Pimpinan BPP atau Penyuluh Pertanian yang kompeten. Anggota: 1.

kepala desa atau lurah; 2. Penyuluh Pertanian; 3. pengendali organisme pengganggu tumbuhan; 4. pengawas benih tanaman; 5. medik veteriner; 6. paramedik veteriner; 7. Pengawas bibit ternak; 8. Pengawas mutu Pakan; 9. Petugas Pertanian kecamatan atau mantri tani; 10. inseminator; dan 11; Petugas lain terkait (mantri statistik atau Penyuluh lain).

3. Faktor yang Mempengaruhi Peran BPP Sebagai Pusat Data Informasi Pertanian Dalam Mendukung Program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe

Adapun definisi dari variabel-variabel yang mempengaruhi peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam Mendukung program Kostratani sebagai berikut:

a. Teknologi Informasi (X₁)

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. (Darmawan, 2012). Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. (Haag & Keen 1996). Teknologi informasi dapat mempengaruhi suatu Lembaga dalam penerimaan atau pengadopsian informasi terbaru yang dapat mendukung fungsi dan kapasitas lembaga. Salah satu teknologi ialah teknologi komunikasi yang dapat diterapkan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) antara lain, komputer, telepon genggam, wifi, internet dan intranet. Beberapa informasi yang dibutuhkan petani dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian, antara lain informasi pasar, teknologi terbaru, program pembangunan pedesaan dan subsidi, harga input dan ketersediaan serta pengolahan pasca panen sehingga penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan.

b. Peran Penyuluh (X₂)

Peran penyuluh sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian modern yaitu pembangunan pertanian berbasis rakyat, Kartasapoetra (1994). Peran penyuluh tersebut adalah: 1. Sebagai peneliti; mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani mengubah kegiatan usaha taninya dengan memanfaatkan

ilmu dan teknologi. 2. Sebagai pendidik; meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usaha taninya secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis. 3. Sebagai penyuluh; menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya. Dapat diartikan bahwa peran penyuluh mempengaruhi kualitas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk itu penyuluh harus memiliki kemampuan tinggi dalam memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian.

c. Kelembagaan (X₃)

Kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain Ostrom, (1985-1986). Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi. Kelembagaan penyuluhan pertanian dan pengorganisasian yang baik dalam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempengaruhi kinerja penyuluh yang dapat menentukan keberhasilan suatu Lembaga dan menjalankan fungsi dan tugasnya.

d. Bantuan Pemerintah (X₄)

Zuchdi (2011) menjelaskan bahwa peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu kepedulian sosial adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dimana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan pemerintah dapat juga diartikan sebagai kepedulian, kepedulian pemerintah untuk memberi bantuan kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam pemenuhan kebutuhan agar tugas dan fungsi dapat dilakukan secara optimal.

e. Sarana dan Prasarana (X₅)

Moenir (1992) menyatakan bahwa pengertian sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari pengertian sarana yg di katakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan. Peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat menunjang kinerja penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, keadaan sarana dan prasarana yang baik tentunya dapat memberikan hasil yang baik pula dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

f. Tenaga/Ahli IT (X₆)

Fungsi dan peran BPP sebagai pusat data informasi pertanian dan kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional mendorong untuk melakukan penguatan sarpras kelembagaan, kapasitas SDM dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Dengan adanya peningkatan kompetensi SDM khususnya tenaga/ahli IT akan mendorong penguatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

g. Partisipasi Petani (X₇)

Peraturan menteri pertanian nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 menegaskan bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani juga dapat diartikan organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”.

Partisipasi kelompok petani mempengaruhi peran penyuluh sebagai fasilitator dan media perantara antara penyuluh dengan kelompok tani. Kuantitas, keikutsertaan, dan keterlibatan petani dapat berpengaruh terhadap pemberian bantuan dan kebijakan pemerintah terhadap penguatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

h. Keadaan Geografi (X₈)

Daldjoeni (1981) berpendapat bahwa geografi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dalam hal spasial (ruang), geografi mempelajari persebaran gejala baik alami maupun manusiawi di muka bumi. Dalam hal ekologi, geografi mempelajari tentang bagaimana manusia harus mampu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalam hal region (wilayah), geografi mempelajari tentang wilayah sebagai tempat tinggal manusia dengan berdasarkan kesatuan fisiografinya. Keadaan geografi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempengaruhi penerimaan dan pengadopsian teknologi informasi yang dapat mendorong BPP menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Keadaan geografi BPP yang tidak baik dapat menghambat proses penerimaan informasi sehingga penguatan peran dan kapasitas untuk mendukung program Kostratani tidak optimal.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diuraikan sebagai bahan acuan untuk melengkapi konten kajian. Analisis hasil pengkajian sangat berguna menjadi bahan pertimbangan penulis dalam menentukan variabel-variabel yang saling berhubungan serta menetapkan metode analisis yang sesuai dengan judul penelitian dan tujuan dilakukannya penelitian.

Yunita dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul, "Implementasi Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Magelang". Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah; (1) penyusunan program; (2) sarana informasi; (3) kelembagaan petani; (4) teknologi; (5) peran penyuluh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penyusunan program tingkat kecamatan di Kabupaten Magelang dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3,57; (2) penyediaan sarana informasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Magelang dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3,59; (3) pelaksanaan pengembangan kelembagaan petani di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tergolong baik dengan skor rata-rata 3,66.

Wahyuni dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul, “Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Penyuluhan Pertanian Komoditi Pangan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar). Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah; (1) peran penyuluh; (2) komoditi pangan; (3) sarana dan prasarana; (4) pembiayaan; (5) pemasaran; (6) saprodi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai wadah penyuluh mempunyai peran penting dalam membantu petani menjadi mandiri sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga meningkat derajat kehidupannya. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan perannya dalam melakukan penyuluhan komoditi pangan dengan baik, akan tetapi masih belum optimal disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, akomodasi dan pembiayaan, serta kekurangan sumberdaya dan tenaga penyuluh. Selain itu, peran penyuluh baru mencapai aspek penyediaan saprodi, budidaya, dan panen. Penyuluh belum sepenuhnya membantu petani mandiri dalam hal pemasaran.

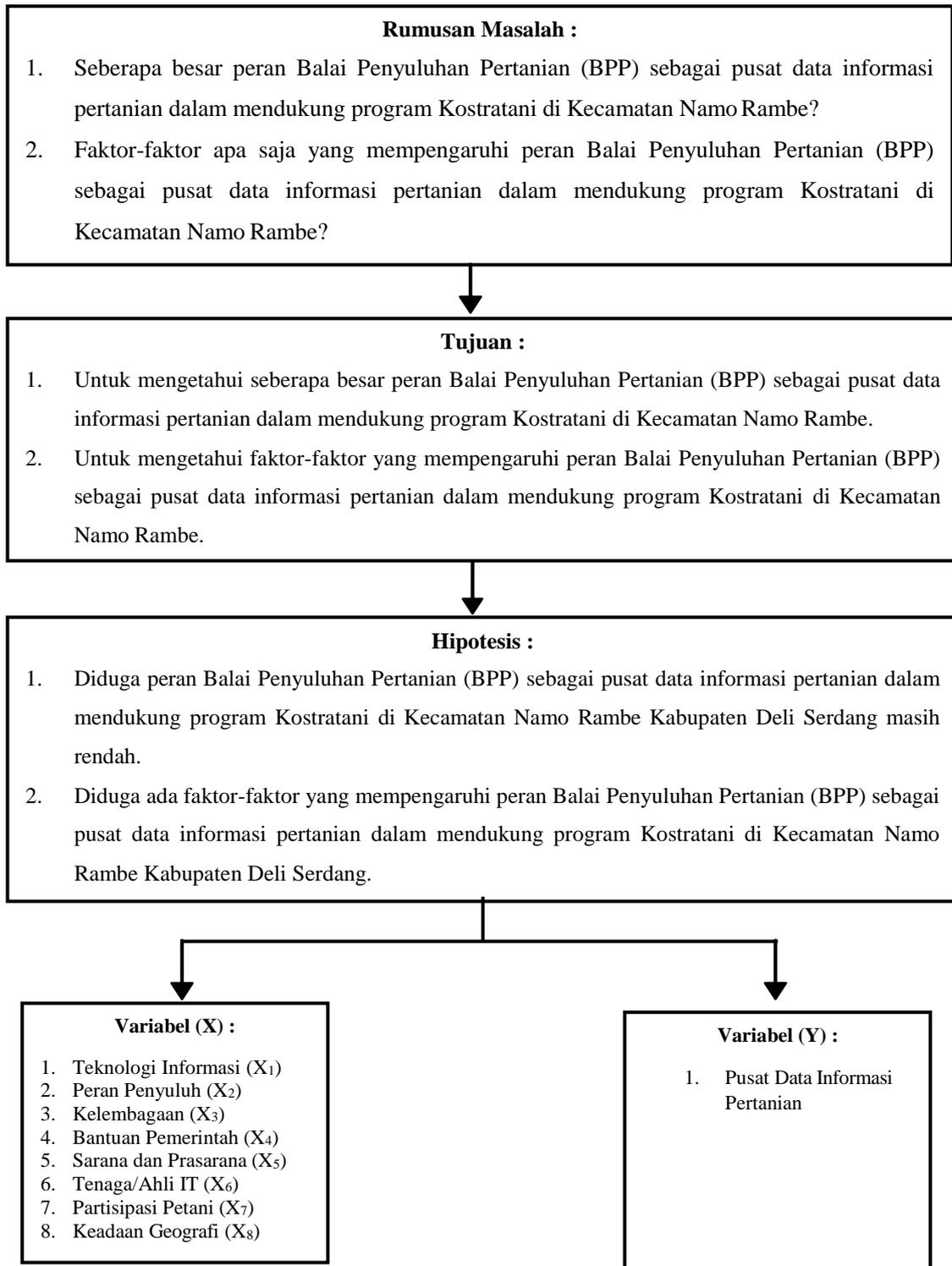
Sugiarto (2016) melakukan penelitian dengan judul. “Peran Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Dalam Peningkatan Swasembada Beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.” Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian tersebut adalah; (1) teknologi informasi; (2) pengetahuan petani; (3) sarana dan prasarana; (4) teknik budidaya; (5) panen dan pasca panen; (6) ketahanan pangan; (7) Peran BP3K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah adalah melaksanakan penyuluhan pertanian, yaitu sebagai upaya memfasilitasi petani melalui penyuluhan yang mengarah pada keterbukaan informasi dan teknologi. Melaksanakan pendampingan kepada petani dalam melaksanakan usaha tani yang meliputi pemilihan benih unggul, pengolahan lahan, sistem tanam, pengairan berselang, pemupukan berimbang, penyiangan, pengendalian hama, dan penyakit tumbuhan, serta panen dan pasca panen. Mengaktifkan petani dalam kelompok tani sebagai sarana bagi petani untuk kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani; (2) Faktor-

faktor yang menghambat peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari keterbatasan SDM petani, yaitu sebagian besar petani memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Keterbatasan kuantitas penyuluh, yaitu jumlah penyuluh pertanian hanya enam orang, sedangkan jumlah desa yang harus dilayani oleh petugas penyuluh adalah delapan desa. Keterbatasan sarana dan prasarana penyuluh, yaitu kurangnya buku-buku atau brosur pertanian dan modul-modul pelatihan pertanian.

C. Kerangka Pikir

Sugiyono (2016), mengemukakan kerangka pikir adalah sebuah sintesa mengenai hubungan antar variabel yang telah dideskripsikan berdasarkan berbagai teori. Kerangka pikir bertujuan sebagai pondasi pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan kegiatan penelitian atau pengkajian yang akan dilakukan. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan penerapan teknologi dan penerimaan informasi pertanian salah satunya ditempuh dengan memperkuat peran dan kapasitas balai penyuluhan pertanian (BPP). BPP sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan.

Adanya Kostratani membuat simpul koordinasi menjadi lebih baik dalam pembangunan pertanian di daerah. Kostratani merupakan program utama Kementerian Pertanian untuk membuat *single* data dan pusat pembangunan pertanian. Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Namo rambe dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya sebagai satu data yang akan berguna bagi pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang tepat serta pusat pembangunan pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mengkaji tentang peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1. Kerangka Pikir Peran BPP Sebagai Pusat Data Informasi Pertanian Dalam Mendukung Program Kostratani